

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, diperlukan pembangunan disegala bidang yaitu bidang ekonomi, bidang industri, bidang pendidikan dan lain-lain. Pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tujuan nasional. Tujuan Nasional yang dimaksud yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan Nasional merupakan pencerminan dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju, dimana Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenang dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Pembangunan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada hakikatnya, Pembangunan ekonomi bertujuan untuk membangun bangsa yang maju, membangun bangsa yang mandiri, dan membentuk masyarakat yang sejahtera. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, jasmani, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dalam usaha pemenuhan kebutuhan material ([www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU200911.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU200911.pdf)).

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dalam usaha pemenuhan kebutuhan material yang diarahkan untuk mempertinggi derajat perekonomian yang besar artinya, bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan sebagai modal pelaksanaan Pembangunan Nasional. Perekonomian di Indonesia saat ini lebih banyak mengarah kepada pembangunan jaringan global mitra, kegiatan pengusaha dan usaha kecil dan menengah. Masalah-masalah dalam perekonomian pada kenyataannya masih banyak ditemui pada masyarakat. Masalah perekonomian dapat disebabkan oleh berbagai sebab, oleh karena itu secara operasional

masalah-masalah perekonomian tidak dapat diselesaikan oleh sektor perekonomian sendiri. Diperlukan tata laksana terintegrasi dan komprehensif dengan kerjasama yang harmonis antar sektor dan antar program. Penyebab masalah ekonomi diantaranya seperti masalah pengangguran, masalah inflasi, ketidakseimbangan produksi dan masalah pemerataan pembangunan ekonomi ([www.anneahira.com/penyebab-permasalahan-pokok-ekonomi.htm](http://www.anneahira.com/penyebab-permasalahan-pokok-ekonomi.htm)).

Beberapa faktor penyebab masalah didalam perekonomian Indonesia diantaranya seperti, masalah pengangguran. Pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/ mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja ([www.zonasiswa.com/2014/12/pengangguran-pengertianjenispenyebab.html](http://www.zonasiswa.com/2014/12/pengangguran-pengertianjenispenyebab.html)).

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu Dinas yang memiliki visi dan misi berkaitan dengan kemajuan UKM. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya No. 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM serta Otonomi Daerah. Masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi saat ini cenderung menuju pada ekonomi campuran, dimana Pemerintah sebagai

pembuat kebijakan dan pihak Swasta sebagai pembantu pelaksana kebijakan. Namun yang masih banyak terjadi rakyat kecil berusaha mencari cara lain untuk bisa mempertahankan hidupnya. Seperti keadaan para pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akibat dari fenomena tersebut, akhir-akhir ini banyak sekali dilakukan penataan terhadap PKL di beberapa wilayah di Indonesia. Pemerintah saat ini sedang melaksanakan program pembersihan kawasan atau jalan dari unsur pedagang kaki lima. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sektor informal ternyata sangat membantu pemerintah dalam hal penyesuaian lapangan kerja serta mengatasi masalah dan menanggulangi pengangguran. Oleh karena itu, peran Pemerintah Kota maupun Kabupaten dalam menunjang sektor sangat diperlukan, seperti penyediaan lokasi yang layak untuk berdagang.

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota besar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan suatu kota. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan Surabaya adalah kota terbesar nomer dua setelah Jakarta. Dimana kota Surabaya tidak dapat terpisahkan dengan kehadiran PKL. Kota Surabaya Timur dikarenakan adanya Jalan Merr atau Jalan Ir. Soekarno sebagai akses dari pembangunan Lingkar Timur/Middle East Ring Road (MERR) II-C. Jalan tersebut adalah jalan besar yang berpotensi untuk membuka usaha di sekitar jalan tersebut. Di daerah tersebut terdapat beberapa sentra PKL salah satunya Sentra PKL Gunung Anyar. Namun, pada Sentra PKL tersebut masih sering terlihat sepi

dari pembeli, padahal kehadiran PKL di kota mempunyai peranan dalam memberikan penghasilan yang relatif cukup bagi penduduk sekitar maupun sebagai produsen-produsen barang-barang dan jasa yang diperlukan masyarakat kelas bawah.

Faktor timbulnya PKL sendiri, disebabkan prosedur pendirian usaha ini relatif mudah, tidak memerlukan biaya dan waktu yang lama serta modal yang relatif kecil pula. Selain memiliki peranan dan fungsi yang menopang perekonomian rakyat kelas bawah tersebut, kehadiran PKL di kota-kota besar diidentifikasi telah memunculkan berbagai permasalahan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan pendidikan. Permasalahan ekonomi yaitu PKL merupakan kegiatan usaha ekonomi berskala kecil dan bermodal relatif kecil, permasalahan sosial budaya antara lain lokasi pemukiman dari rumah tangga PKL ini umumnya di daerah-daerah yang kumuh di perkotaan, di daerah-daerah yang kurang strategis. Permasalahan lingkungan antara lain mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas kota, keindahan dan kebersihan kota serta kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Hal tersebut didukung dengan berita yang diterbitkan oleh detik news yang mengatakan bahwa :

"Pemkot Surabaya boleh dibilang berhasil menertibkan PKL dengan menempatkan di sentra kuliner. Sayangnya, upaya itu tidak dibarengi dengan manajemen yang baik. Sehingga banyak yang masih sepi dari pemburu kuliner. Dengan nakhoda baru, Eko Haryanto sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya bertekad 'menghidupkan' sentra kuliner yang masih sepi dengan mencari penyebabnya." Kami akan mencoba melihat kelemahan-kelemahan dari sentra-sentra kuliner ini lalu mencoba untuk memberdayakan mereka," kata Eko di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu (11/1/2017). Mantan Asisten IV ini menegaskan tahun 2017 pihaknya tidak akan fokus pada pembangunan

sarana dan prasarana sentra PKL/kuliner baru. Tapi bagaimana meramaikan sentra kuliner yang masih sepi dan kurang menarik minat pembeli. "Kami akan 'roadshow' untuk melihat dan mencari permasalahan di sentra kuliner yang masih sepi dan yang sudah ramai tapi kurang bagus manajemen keuangannya," imbuh Eko. Dirinya tidak memungkiri ada sentra kuliner yang pedagangnya sudah mempunyai pembeli tetap. Namun saat dipindah ke dalam gedung yang lebih layak, malah menurun penghasilan dan kehilangan pelanggan. "Ada tiga hal penting yang harus dilakukan dalam upaya menghidupkan sentra kuliner di Surabaya. Yakni manajemen produksi, manajemen keuangan dan manajemen pengelolaan," ujar dia. Fokus lainnya untuk menarik pembeli dan menghidupkan sentra kuliner diantaranya, menata penampilan sentra kuliner menjadi lebih bagus dan bersih, makanan yang dijual menarik, taste alias rasa makanan tersebut unik serta membangun brand agar di setiap sentra PKL punya keunikan dan keunggulan tersendiri. "Harapan kami, Maret nanti sudah ada penampilan berbeda. Ini saya kejar tayang. Karena itu, saya butuh bantuan teman-teman media untuk ikut memberikan saran," tandas Eko." (*DetikNews, Surabaya 11-01-2017*).

Lokasi sentra PKL yang masih sepi tersebut, juga ditemukan di salah satu wilayah kota Surabaya Timur yang terletak di Kecamatan Gunung Anyar. Hal ini, didukung dari berita yang ditemukan oleh penulis sebagai berikut :

"Surabaya– Belasan sentra pedagang kaki lima (PKL) di Surabaya hingga kini belum berjalan sesuai harapan. Beberapa sentra PKL tersebut masih banyak yang sepi dan bahkan ada yang mati suri. Sentra PKL Gunung Anyar salah satunya. Sempat digadang-gadang menjadi pusat kegiatan kelompok usaha kecil, mikro, dan menengah, kini kondisinya memprihatinkan. Tidak ada aktivitas lagi di sana. Sebanyak 20 pedagang pegiat UMKM yang sempat menghuni stan-stan PKL telah pergi. Padahal, kompleks perdagangan masyarakat kecil ini dibangun cukup megah. Tidak hanya modelnya yang tinggi dan kukuh, fasilitasnya juga terbilang lengkap. Ada lahan parkir luas, musala, serta toilet yang lumayan bagus. Bahkan, para pedagang juga diberi fasilitas gerobak gratis oleh Pemkot Surabaya. Namun, fasilitas memadai tidak lantas membuat para pedagang betah dan bertahan. Mereka memilih tutup dan meninggalkan lapak-lapak mereka. "Jualan di sini (sentra PKL) sepi Mas. Penjualnya jadi bangkrut. Akhirnya memilih tutup," tutur Muhtarom, salah seorang warga. Pria berkumis ini tidak mengetahui penyebab pasti sepi sentra PKL tersebut. Namun, dia menduga hal itu karena letak sentra PKL yang kurang tepat. "Lokasinya jauh dari keramaian, jadinya orang malas untuk datang," tutur pria berkumis ini. Anggota Komisi B

DPRD Surabaya Baktiono tidak menampik fakta tersebut. Bahkan politikus PDI Perjuangan ini menyebut, total ada 14 sentra PKL yang kondisinya memprihatinkan. Sepi dan cenderung tutup. Beberapa di antaranya berada di Keputih, Pegirian, kompleks wisata religi Sunan Ampel, Jambangan, serta Urip Sumoharjo. “Ini kan eman. Miliaran rupiah uang rakyat dipakai untuk membangun sentra PKL itu, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan,” tegasnya. Karena itu, pihaknya mendesak Pemkot Surabaya untuk melakukan upaya penyelamatan dengan mendesain ulang (redesain) sentra PKL tersebut. Misalnya, dengan menyesuaikan jenis dagangan dengan kultur setempat, mengubah konsep tampilan, serta yang lebih penting lagi adalah menyesuaikan dengan studi kelayakan yang ada. “Perlu ada kajian ulang atas sentra-sentra PKL tersebut. Apa saja jenis dagangan yang cocok dan diminati pembeli sehingga orang tertarik untuk datang. Jangan lantas dibiarkan begitu saja, hingga menjadi sepi dan mati,” tutur anggota DPRD yang juga seorang musisi ini. Karena itu, peran aktif Bagian Perekonomian Pemkot Surabaya sangat dibutuhkan. Mereka harus melakukan kajian ekonomi untuk sentra UKM tersebut. Hasil kajian dan saran bagian ekonomi inilah yang harus dijalankan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pengelola. Baktiono juga menyampaikan, kondisi sepi sejumlah sentra PKL bukti tidak adanya perencanaan dan kajian yang matang sehingga kesan yang muncul adalah sentra itu dibangun sesuai dengan selera pemerintah kota sendiri. “Nah, yang seperti itu harus diperbaiki,” tuturnya. Hal sama juga disampaikan Ketua DPRD Surabaya Armuji. Dia menyampaikan, persoalan sentra PKL menjadi hal serius yang harus diatasi. Sebab, pembangunan sentra PKL memang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. “Jangan sampai tujuan mulia itu ternoda. Jadi, mau tidak mau harus ada upaya untuk menyelamatkannya,” ujar Armuji. Armuji berharap, pejabat baru di Dinas Koperasi dan UMKM bisa mengatasi persoalan tersebut. Menghidupkan kembali sentra PKL yang mati suri dan meramaikannya. “Kalau ternyata hasilnya sama dengan yang dulu, ya percuma,” sindirnya. Untuk diketahui, saat ini Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dijabat Eko Harianto. Mantan Asisten IV Sekkota Surabaya ini menggantikan posisi Hadi Mulyono yang berpindah sebagai staf ahli.”(Koran Sindo, Surabaya 04-01-2017).

Sentra Pedagang Kali Lima (PKL) serta Sentra Kuliner yang dibangun Pemkot Surabaya, kini banyak yang ditinggalkan pedagang. Yang paling mengenaskan adalah sentra PKL di kawasan Surabaya Timur. Sentra Kuliner yang sudah diresmikan 3 (tiga) tahun lalu, saat ini hanya ada 10 (sepuluh)

pedagang yang berjualan disana, padahal jumlah stand yang tersedia sebanyak 30 stand. Berdasarkan pantauan Bhirawa, ada beberapa sentra PKL yang bisa dikatakan hidup segan mati tak mau. karena, dari puluhan gerobak PKL yang disediakan, banyak yang tutup. PKL yang aktif bisa dihitung dengan jari. Ini semua terjadi karena tak ada pembeli yang datang sehingga membuat pedagang pun memilih tutup daripada merugi terus menerus. Meski berada di jalan raya, bukan jaminan ramai seperti yang dialami sentra Kuliner Gunung Anyar. Puluhan gerobak PKL tampak hanya sebagai pajangan karena tak ada aktivitas. Puluhan kursi besi ditumpuk diatas meja, hanya ada satu pedagang yang aktif berjualan.

Masalah sepiunya pembeli di lokasi sentra PKL yang sepi, membuat para calon pedagang menjadi enggan untuk membuka usaha di tempat tersebut. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Surabaya bekerja sama dengan Kecamatan Gunung Anyar memberikan kebijakan untuk berjualan pada waktu pagi hari hingga malam hari dengan catatan harus bertanggung jawab atas kebersihan disekitar sentra PKL di Kecamatan Gunung Anyar. Dengan diadakannya program pembersihan kawasan atau jalan dari unsur PKL dan memusatkannya pada suatu lokasi tertentu, bertujuan untuk mewujudkan lokasi yang tertib, sehat, rapi dan indah serta untuk mengurangi jumlah kemacetan lalu lintas kota Surabaya. Hal tersebut, telah diatur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2003 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam mewujudkan keindahan kota Surabaya Dinas Koperasi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pemkot Surabaya mempunyai kebijakan dalam mempunyai

tugas serta fungsi dalam memberikan penataan dan pengembangan PKL yang dimana Dinas Koperasi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) mempunyai tujuan antara lain :

- a. Mewujudkan PKL sebagai pelaku usaha kecil yang terdaftar dan berhak mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan.
- b. Mengembangkan ekonomi sektor informal melalui pembinaan PKL serta mewujudkan harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya.

Dinas Koperasi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pemkot Surabaya mempunyai visi dan misi, diantaranya seperti :

Visi : “Menjadikan Koperasi Dan UMKM Kota Surabaya yang Berkualitas”.

Misi :

1. Menjadikan Kelompok usaha mikro kecil yang mempunyai produk berkualitas dan berdaya saing serta mampu mengakses pasar.
2. Mewujudkan koperasi yang mampu mengembangkan usaha.
3. Meningkatkan kemampuan koperasi untuk melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang berkualitas.
4. Mewujudkan PKL yang beretika dan berestetika.
5. Pengembangan potensi bidang koperasi dan UMKM.
6. Memonitor pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan UMKM

Selain itu, Dinas Koperasi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pemkot Surabaya mempunyai sasaran penataan dan pemberdayaan antara lain :

- a. Terciptanya ketertiban umum

- b. Terwujudnya tertib umum.
- c. Terciptanya keseimbangan, keselarasan dan keserasian
- d. Meningkatkan kinerja usaha PKL menjadi kelompok yang resmi sebagai sasaran binaan.
- e. Terwujudnya dukungan ruang bagi keberadaan PKL.
- f. Terciptanya keberadaan PKL yang harmonis dengan kegiatan usaha lain.

Melihat dari fenomena yang terjadi pada Sentra PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya yang sepi dari pembeli tersebut, maka peneliti membuat judul penelitian "**Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) Gunung Anyar Kota Surabaya**".

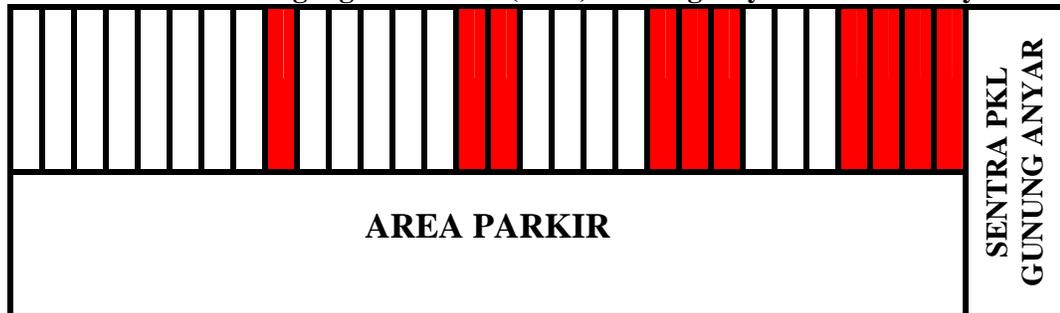
Sentra PKL Gunung Anyar Kota Surabaya memiliki jam operasional serta berbagai syarat untuk menjadi pedagang di sentra kuliner tersebut. Berikut adalah tabel pendukung dari pernyataan tersebut :

**Tabel 1.1**  
**Tabel Persyaratan, Waktu Operasional, Jumlah Stand dan Stand yang Terpakai pada Sentra PKL (Pedagang Kaki Lima) Gunung Anyar Kota Surabaya**

Syarat	Harus Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kota Surabaya
Waktu Operasional	Senin-Minggu Pukul 10.00-22.00 WIB
Jumlah Stand	30 Stand
Stand Terpakai	10 Stand

*Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya*

**Gambar 1.1**  
**Denah Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) Gunung Anyar Kota Surabaya**



*Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya*

- : Stand yang telah terisi
- : Stand yang masih kosong

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Sentra PKL Gunung Anyar Kota Surabaya?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan, menganalisa dan mengidentifikasi tentang Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Sentra PKL Gunung Anyar Kota Surabaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan bagi para mahasiswa tentang bagaimana Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dalam memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Sentra PKL Gunung Anyar Kota Surabaya.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk menambah referensi penelitian dalam kegiatan ilmiah, menambah arsip perpustakaan guna kepentingan dalam penelitian dan menambah wawasan baru khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

Hasil penelitian juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dalam memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) Gunung Anyar Kota Surabaya.

4. Bagi PKL Gunung Anyar Kota Surabaya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai masalah yang ada di Sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) Gunung Anyar Kota Surabaya yang berkaitan dengan Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.